

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pulau Rempang merupakan salah satu pulau yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Luas wilayah Pulau Rempang yaitu sekitar 16 hektar yang terbagi menjadi 2 kelurahan dan memiliki 16 kampung tua yang dihuni sekitar 7.512 penduduk, 2 kelurahannya yaitu Rempang Cate dan Sembulang; sesuai dengan penjelasan Dedi Arman, masyarakat adat di Rempang yang telah tinggal lama di Pulau Rempang berasal dari tiga suku asli Rempang, yaitu suku melayu galang, suku orang darat, dan suku orang laut (Fuzain, 2023: 1081). Ariastuty di Batam pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 menjelaskan (BP Batam, 2023) bahwa pengembangan Pulau Rempang masuk ke dalam daftar Program Strategis Nasional sesuai dengan arahan Pak Menko; besar harapan bahwa program tersebut dapat memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kepri, khususnya Kota Batam.

Dijelaskan di artikel *web* BP Batam (2023) bahwa rencana pengembangan Pulau Rempang sudah dimulai pada pertengahan tahun 2004. Saat itu surat rekomendasi DPRD Kota Batam pada tanggal 17 Mei 2004 membuka sejarah awal masuknya investasi ke kawasan Pulau Rempang. Kemudian, Pulau Rempang disetujui untuk dikembangkan menjadi kawasan perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata meliputi Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE). Investasi

Rempang Eco City ditaksir 381 triliun, serta diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 306 ribu orang. Rempang Eco City yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) diharapkan dapat menjadikan Batam sebagai lokomotif perekonomian Kepri.

Di Rempang akan dilakukan pembangunan kawasan industri yang dinamakan proyek Rempang Eco City, proyek ini sebenarnya telah mencuat pada tahun 2004, saat itu Pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam bekerja sama dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai mitra swasta; proyek Rempang Eco City merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 yang tertuang di dalam peraturan menteri koordinator bidang perekonomian republik Indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional yang disahkan pada 28 Agustus 2023 (Fuzain, 2023: 1088).

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang menimbulkan kekhawatiran masyarakat yang tinggal di Pulau Rempang yang berpotensi adanya konflik antara masyarakat setempat dan investor. Dasar utama terjadinya konflik karena adanya Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000 pada pasal 21 ayat menyebutkan bahwa bila kota Batam sudah menjadi daerah otonom, maka pemerintah kota Batam mengikutsertakan Kewenangan Batam untuk penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Timbulnya perselisihan bagi BP Batam maupun pemerintah kota Batam

karena pembagian kekuasaannya tidak dijelaskan secara rinci. Lalu, pada pasal 21 ayat (3) menyebutkan bahwa hubungan ketenagakerjaan antara pemerintah kota Batam dengan Otorita Batam tetap diatur dengan peraturan pemerintah. (Ghuffran dkk, 2024: 393).

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) atau Rempang Eco City di Pulau Rempang menuai perlawanan yang merupakan hambatan dari proses pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang. Perlawanan yang dilakukan masyarakat Pulau Rempang merupakan kekhawatiran masyarakat untuk mempertahankan warisan, dan masa depan anak cucu mereka di Pulau Rempang yang merupakan rumah bagi mereka dari generasi ke generasi. Kurangnya komunikasi membuat masyarakat di Pulau Rempang memiliki ketidakpercayaan dan kekhawatiran yang semakin memperkuat perlawanan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang.

Resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Rempang yaitu masyarakat Rempang dengan kompak dan aktif melakukan demonstrasi yaitu aksi protes untuk menyuarakan bahwa mereka menolak proyek tersebut. Masyarakat mempertahankan tanah tempat tinggal mereka dengan cara tetap melakukan aktivitas sehari-hari mereka meskipun ada tekanan dan intimidasi. Masyarakat Rempang juga secara tegas melakukan penolakan untuk meninggalkan rumah dan kampung mereka dengan cara memasang spanduk didepan rumah yang bertuliskan “kami menolak direlokasi/ geser” dan melakukan penjagaan di pos secara bergantian dan berkelompok. Selain itu, masyarakat Rempang juga secara aktif

berkomunikasi dan bersuara melalui media untuk mendapatkan dukungan dan perhatian publik terhadap perjuangan mereka dalam mempertahankan tanah tempat tinggal mereka.

James Scott (Fakhrurrazi dkk, 2022: 48) menjelaskan bahwa resistensi memfokuskan mengenai bentuk perlawanan yang benar-benar terjadi di sekitar atau kehidupan sehari-hari yang digambarkan dengan jelas bagaimana bentuk perlawanan kaum yang tidak memiliki kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka atau kaum minoritas lemah. Menurut James Scott, terdapat dua bentuk resistensi, yaitu: resistensi terbuka (protes sosial atau demonstrasi), merupakan bentuk dari resistensi yang terorganisasi, sistematis, dan berprinsip, dengan cara kekerasan seperti pemberontakan; dan resistensi tertutup (simbolis atau ideologis), merupakan penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat, contohnya gosip, fitnah, atau penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa (Fakhrurrazi dkk, 2022: 48). Jadi, resistensi yaitu suatu tindakan penolakan atau perlawanan terhadap sesuatu yang dianggap menindas untuk melawan ketidakadilan yang terjadi.

Hegemoni adalah konsep politik yang dikembangkan oleh sosiolog dari Italia, Antonio Gramsci, dengan mengacu pada sebuah kondisi dimana kelas dominan tidak hanya mengatur, tetapi juga mengarahkan masyarakat melalui pemaksaan kepemimpinan moral dan intelektual (Sugiharti, 2019: 44-45). Hegemoni merupakan konsep yang menjelaskan mengenai penguasaan tiran atau elite terhadap mereka yang lemah, konsep ini dipopulerkan pemikir Italia, yaitu

Antonio Gramsci (Miftakhuddin, 2019: 178). Bagi Gramsci (Barker, 2016: 122), hegemoni mengisyaratkan situasi dimana “blok historis” berupa faksi-faksi kelas penguasa memainkan otoritas sosial dan kepemimpinan atas kelas-kelas dibawahnya. Gramsci (Barker, 2016: 125) menyifatkan hegemoni sebagai proses yang berkesinambungan yang terdiri dari terbentuk dan terunggulnya kesetimbangan-kesetimbangan antara kepentingan-kepentingan kelompok fundamental dan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok subordinat, kesetimbangan-kesetimbangan dimana kepentingan-kepentingan kelompok yang dominan menang dan berkuasa, tetapi hanya sampai pada titik tertentu saja.

Hegemoni bukanlah sebuah entitas statis, hegemoni ditandai dengan serangkaian diskursus dan praktik-praktik yang terus berubah secara intrinsik dan terikat dengan kekuasaan sosial (Barker, 2016: 125). Jadi, hegemoni merupakan konsep dominasi atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau entitas untuk mencapai suatu tujuan yang melibatkan aspek sosial, budaya, dan ideologi. Adanya ekspektasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai pendorong kemajuan dan kesejahteraan, bertentangan dengan realitas yang terjadi mengenai adanya pengusuran dan berpotensi hilangnya identitas dan nilai-nilai budaya serta warisan sejarah masyarakat setempat.

Istilah dekonstruksi adalah ciptaan filsuf Prancis, yaitu Jacques Derrida. Dekonstruksi adalah suatu cara membaca teks secara interpretatif atau hermeneutik dengan cara radikal, alih-alih menampilkan kehadiran makna asli sebuah teks, dekonstruksi justru meninggalkan usaha rehabilitasi seperti itu (Hardiman, 2016:

163). Dekonstruksi adalah bagian dari kelompok postmodernis yang ingin lepas dan putus dengan modernitas, maka pandangannya terhadap modernitas itulah yang jadi intinya (Norris, 2021: viii).

Derrida mengatakan bahwa dekonstruksi terjadi dalam ruang antara hukum dan keadilan. Lokalitas dekonstruksi adalah aporia, yaitu momen ketika garis batas antara hukum dan keadilan itu runtuh. Dekonstruksi adalah keadilan, baik dekonstruksi maupun keadilan adalah sebuah dinamika, sebuah gerakan pada perbatasan antara yang dapat dimengerti dan yang tidak dapat dimengerti, didalam dan diluar tatanan hukum (Hardiman, 2016: 184). Mendekonstruksi berarti melucuti, membongkar, guna mencari dan memperlihatkan asumsi-asumsi suatu teks (Barker, 2016: 156). Jadi, dekonstruksi bertujuan untuk membongkar struktur dan makna yang ada pada teks, sistem, ataupun konsep untuk menggali lebih dalam dan menemukan kontradiksi atau pemahaman baru dengan cara yang lebih kritis.

Faktor penyebab resistensi yang dilakukan masyarakat Rempang atas pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) yaitu dikarenakan adanya hegemoni narasi pembangunan dan kemajuan ekonomi yang dikemukakan Pemerintah bahwa jika PSN Rempang Eco-City merupakan proyek yang membawa kemajuan dan menyediakan banyak lapangan kerja. Penerapan teori dekonstruksi Jacques Derrida terhadap resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Rempang atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City bertujuan untuk membongkar dan menunjukkan bagaimana hegemoni narasi pembangunan yang akan membuat masyarakat sejahtera dengan adanya relokasi dan fasilitas-fasilitas pendukung

lainnya yang akan diberikan nantinya, justru hal tersebut membuat masyarakat Rempang marah dan merasa tidak adanya transparansi mengenai proyek tersebut, sehingga membuat masyarakat Rempang melakukan berbagai bentuk resistensi dengan berbagai faktor penyebabnya.

Proyek Strategis Nasional (PSN) bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi pada suatu daerah. Namun, Proyek Strategis Nasional (PSN) juga dapat menimbulkan konflik di suatu daerah dikarenakan berkaitan dengan penggusuran lahan serta relokasi masyarakat setempat dan perubahan lingkungan. Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu masyarakat di Pulau Rempang yang akan di relokasi karena adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Rempang Eco City yang akan dilaksanakan di Pulau Rempang. Masyarakat Pulau Rempang tidak menyetujui adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang yang membuat masyarakat Pulau Rempang di relokasi. Masyarakat di Pulau Rempang memperjuangkan hak-hak mereka untuk mempertahankan tanah adat tempat tinggal mereka.

Pulau Rempang merupakan sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, menjadi bagian dari rencana pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yang bertujuan untuk mendorong dan mengembangkan ekonomi serta pembangunan yang berskala besar. Masyarakat Rempang yang sudah mendiami atau tinggal di pulau tersebut secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan adanya relokasi menimbulkan resistensi yang kuat. Adapun yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu gambaran umum masyarakat

dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang; bentuk resistensi, faktor penyebab resistensi; dampak dari resistensi yang dilakukan; dan solusi dari resistensi tersebut, pembahasan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Timbulnya permasalahan yang ada, diperlukan solusi atau jalan keluar yang bersifat adil untuk mengatasi resistensi masyarakat Rempang.

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilakukan di Pulau Rempang, yaitu Rempang Eco City memicu konflik yang signifikan dengan masyarakat di Pulau Rempang. Adanya penggusuran dan relokasi masyarakat di Pulau Rempang karena pembangunan proyek tersebut menimbulkan resistensi yang kuat, sehingga perlu dianalisis secara mendalam menggunakan teori yang relevan. Bahasa dan wacana memainkan peran penting. Teori dekonstruksi Derrida dapat membongkar konsep-konsep dengan cara mendekonstruksi narasi yang dapat mengungkapkan ambiguitas dan kontradiksi yang tersembunyi di dalamnya. Resistensi masyarakat di Pulau Rempang merupakan bentuk dari perlawanan terhadap hegemoni narasi pembangunan yang akan dilakukan. Teori hegemoni Gramsci dapat membantu dalam memahami bagaimana suatu kekuasaan mempengaruhi persepsi dan tindakan suatu masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN).

Penelitian “Resistensi Masyarakat Rempang Atas Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Dalam Wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau” sangatlah penting, untuk memahami bahwa perlawanan yang dilakukan merupakan bentuk rasa kekhawatiran masyarakat karena kurangnya partisipasi masyarakat Pulau Rempang dalam pengambilan keputusan yang

menimbulkan ketidakpercayaan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan sebuah peristiwa, melainkan memahami dinamika yang terjadi, dampak adanya pembangunan, akar permasalahan yang terjadi, pentingnya menghormati hak-hak dan suara masyarakat yang terdampak dalam proses pembangunan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Apa saja bentuk resistensi masyarakat Rempang atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam wilayah Batam, provinsi Kepulauan Riau?
- 1.2.2 Apa saja faktor penyebab resistensi masyarakat Rempang atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam wilayah Batam, provinsi Kepulauan Riau?
- 1.2.3 Apa saja dampak resistensi masyarakat Rempang atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam wilayah Batam, provinsi Kepulauan Riau?
- 1.2.4 Apa solusi dari resistensi masyarakat Rempang atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam wilayah Batam, provinsi Kepulauan Riau?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan:

- 1.3.1 Bentuk resistensi masyarakat Rempang atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam wilayah Batam, provinsi Kepulauan Riau.
- 1.3.2 Faktor penyebab resistensi masyarakat Rempang atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam wilayah Batam, provinsi Kepulauan Riau
- 1.3.3 Dampak resistensi masyarakat Rempang atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam wilayah Batam, provinsi Kepulauan Riau.
- 1.3.4 Solusi resistensi masyarakat Rempang atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam wilayah Batam, provinsi Kepulauan Riau.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis merujuk pada sebuah kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu pengetahuan dan teori yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, selain menambah jumlah hasil penelitian mengenai perlawanan masyarakat di Pulau Rempang atas perlawanan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama menjadi rujukan dan referensi peneliti berikutnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peran pemerintah dalam menanggulangi dampak dari permasalahan yang terjadi. Penelitian ini menampilkan faktor yang dapat memberi pemahaman tentang apa penyebab dari perlawanan yang dilakukan masyarakat di Pulau Rempang

terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam wilayah Batam, provinsi Kepulauan Riau, dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan yang terjadi.

